



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Selamat Datang

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

KAMPUNG PUDUK KELURAHAN PALAM KECAMATAN CEMPAKA

telepon Nomor 59 RT.03 RW.01 Telp. 0852.5168.6230

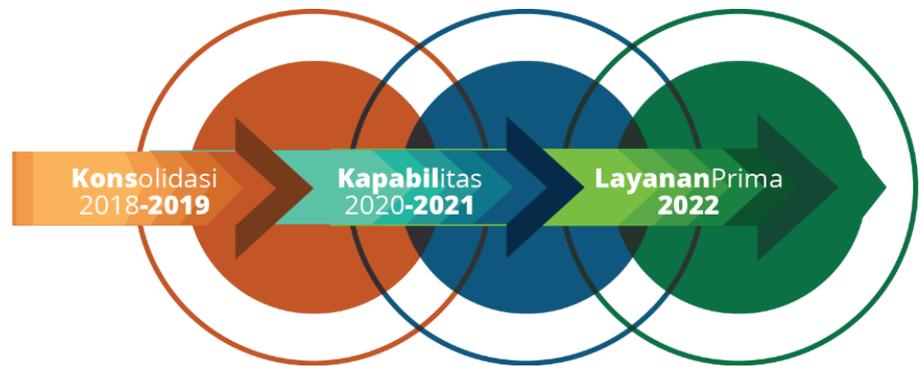


Abdi Persawa FM
Banjarbaru
104,7



LAPOR!

SIARAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RA



RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021
(REVISI)

BANJARBARU
2018

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Banjarbaru periode 2016-2021 merupakan bagian integral dari program pembangunan Kota Banjarbaru yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD perubahan 2016-2021.

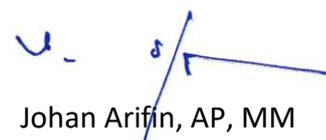
Secara garis besar Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adanya perubahan RPJMD 2016-2021, perubahan sasaran yang akan dicapai untuk mendukung misi Kepala Daerah terpilih, perubahan nomenklatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2017 serta perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan, membuat penyusunan RENSTRA Revisi Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi penting sebagai acuan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika.

Dengan disusunnya RENSTRA revisi ini, maka RENSTRA yang telah disusun sebelumnya oleh Dinas Kominfo tidak lagi menjadi acuan arah pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi. RENSTRA revisi akan menjadi acuan bagi arah pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi yang dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan aparatur Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua.

Banjarbaru, 2018
Kepala Dinas,



Johan Arifin, AP, MM
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 19750328 199501 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| Daftar Lampiran | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika..... | 7 |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika | 10 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... | 14 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika | 21 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA..... | 26 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika | 26 |
| 3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 27 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 28 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan | 28 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... | 31 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 34 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika | 34 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA..... | 36 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 39 |

| | |
|--|-----------|
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 53 |
| BAB VIII PENUTUP | 55 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Keterkaitan Renstra Diskominfo dan Sasaran Strategis Misi Keempat RPJMD | 3 |
| Tabel 1.2 Keterkaitan Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalsel dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru | 4 |
| Tabel 2.1 Perubahan Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru..... | 8 |
| Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017 | 11 |
| Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 ... | 11 |
| Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru | 15 |
| Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru | 18 |
| Tabel 2.6 Keterkaitan Sasaran Strategis pada Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalsel dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru . | 22 |
| Tabel 3.1 Analisis SWOT | 28 |
| Tabel 3.2 Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Isu KLHS..... | 29 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru | 34 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... | 36 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru | 42 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Berdasarkan Perwali Nomor 64 Tahun 2016 | 9 |
| Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Berdasarkan Perwali Nomor 85 Tahun 2017 | 10 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
- Lampiran 2 Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2021
- Lampiran 3 Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021
- Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
- Lampiran 5 Manual Perhitungan Indikator Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
- Lampiran 6 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Banjarbaru

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 84 menyebutkan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang telah direvisi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bertanggungjawab terhadap urusan Komunikasi dan Informatika yang difokuskan untuk mewujudkan misi keempat Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yaitu **“Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi”**, tujuan 1 *“Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru efektif, efisien, akuntabel dan bebas kkn”* dan sasaran ke 3 : *“Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Informasi Publik”*

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berpedoman kepada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang telah direvisi dan dibuat guna mendukung Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan Visi Kota Banjarbaru yaitu **“Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter”**.

Dalam mendukung Visi Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan satu Visi yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang**

Menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Yang HARAT (HANDAL, AMAN, RESPONSIF DAN TERINTEGRASI)” dengan misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan informasi publik
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika.

Saat ini perkembangan dunia terkait dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan publik pun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, yang mengamanatkan setiap Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government*).

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan lima tahunan, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA. Keterkaitan Renstra Diskominfo dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Keterkaitan Renstra Diskominfo dan Sasaran Strategis Misi Keempat RPJMD

| No | SASARAN STRATEGIS | BIDANG | SASARAN STRATEGIS SETIAP BIDANG | PROGRAM |
|----|--|-------------------------------|---|--|
| 1 | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah |
| | | PERENCANAAN | Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | PENGAWASAN | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |
| | | PELAPORAN | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| | | KEPEGAWAIAN | | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |
| | | TATA KELOLA | | Penataan Peraturan Perundang Undangan |
| | | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah |
| | | KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| | | | Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | PENGAWASAN | Menurunnya temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH |
| | | PELAPORAN | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| | | PENGAWASAN | Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH |
| | | PELAPORAN | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| 2 | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | TATA KELOLA | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan |
| | | LAYANAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan |
| | | KEPENDUDUKAN | | Penataan Administrasi Kependudukan |
| | | PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan terpadu satu pintu | Peningkatan Pelayanan Masyarakat |

| | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|
| | | KESEHATAN | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD) |
| | | KESEHATAN | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas | Standardisasi Pelayanan Kesehatan |
| | | KERJASAMA | | Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah |
| 3 | TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK | TATA KELOLA TIK | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK |
| | | | | Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah |
| | | | | Pengembangan Persandian Nasional |
| | | | | Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK |
| | | | Terwujudnya akses dan kualitas layanan informasi publik | Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik |
| | | | | Pengembangan Data/Informasi/Statistik |
| | Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | | | |

Keterkaitan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi Kalsel dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
 Keterkaitan Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalsel dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

| Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2015-2018 | Sasaran Strategis Diskominfo Provinsi Kalsel Tahun 2017-2021 | Sasaran Strategis Diskominfo Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 |
|---|---|--|
| Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia | Meningkatnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Provinsi Kalsel | terwujudnya kualitas layanan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi |
| Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia | Meningkatnya layanan jaringan komunikasi publik di Provinsi Kalsel | terwujudnya akses dan kualitas layanan informasi publik |
| | Meningkatnya kualitas e-Government di Provinsi Kalsel | |
| | Meningkatnya kualitas layanan informasi public dan statistic sektoral di Provinsi Kalsel | |
| Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif | Meningkatnya kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Provinsi Kalsel | Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan |

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
6. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus sebagai acuan kesesuaian dalam menetapkan program/kegiatan, sasaran strategis sekaligus dapat menjadi pedoman bagi arah kebijakan keuangan selama 5 tahun.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru (RPJMD 2016-2021).
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh SOPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

- **Tugas Pokok :**
Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- **Fungsi :**
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informatika;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik dan Persandian ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
- **Susunan Organisasi**
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas.**
 - b. Sekretaris**, membawahi :
 1. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Kepala Bidang Komunikasi**, membawahi :
 1. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Mass Media, dan Pemberdayaan Kelembagaan Informasi.
 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Komunikasi
 - d. Kepala Bidang Informatika**, membawahi:

1. Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
 2. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Pengembangan Web Pemerintah Daerah
 3. Kepala Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- e. Kepala Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:**
1. Kepala Seksi Statistik;
 2. Kepala Seksi Persandian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional**

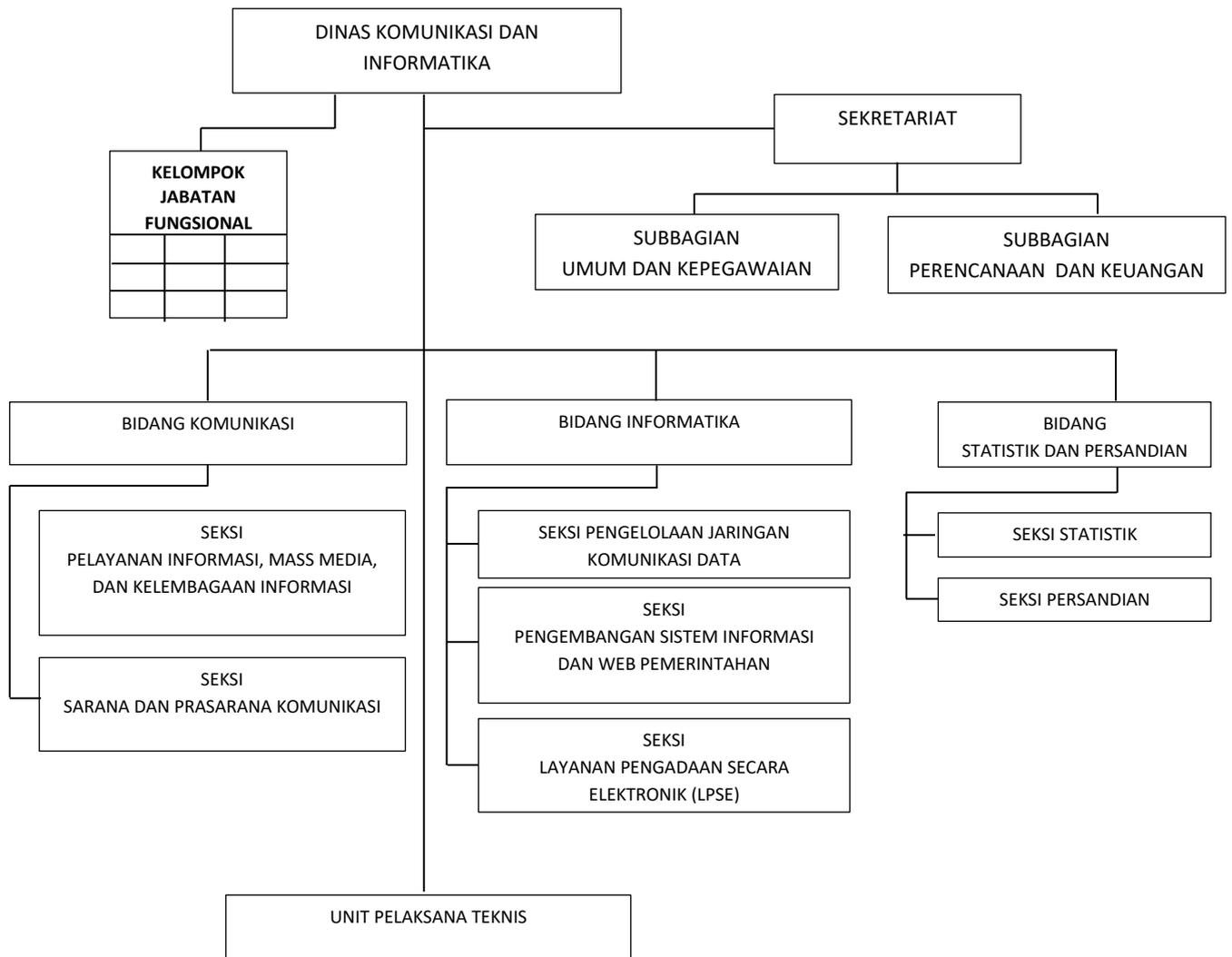
Pertengahan tahun 2017, kewenangan penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak lagi berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, karena itu beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diubah melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

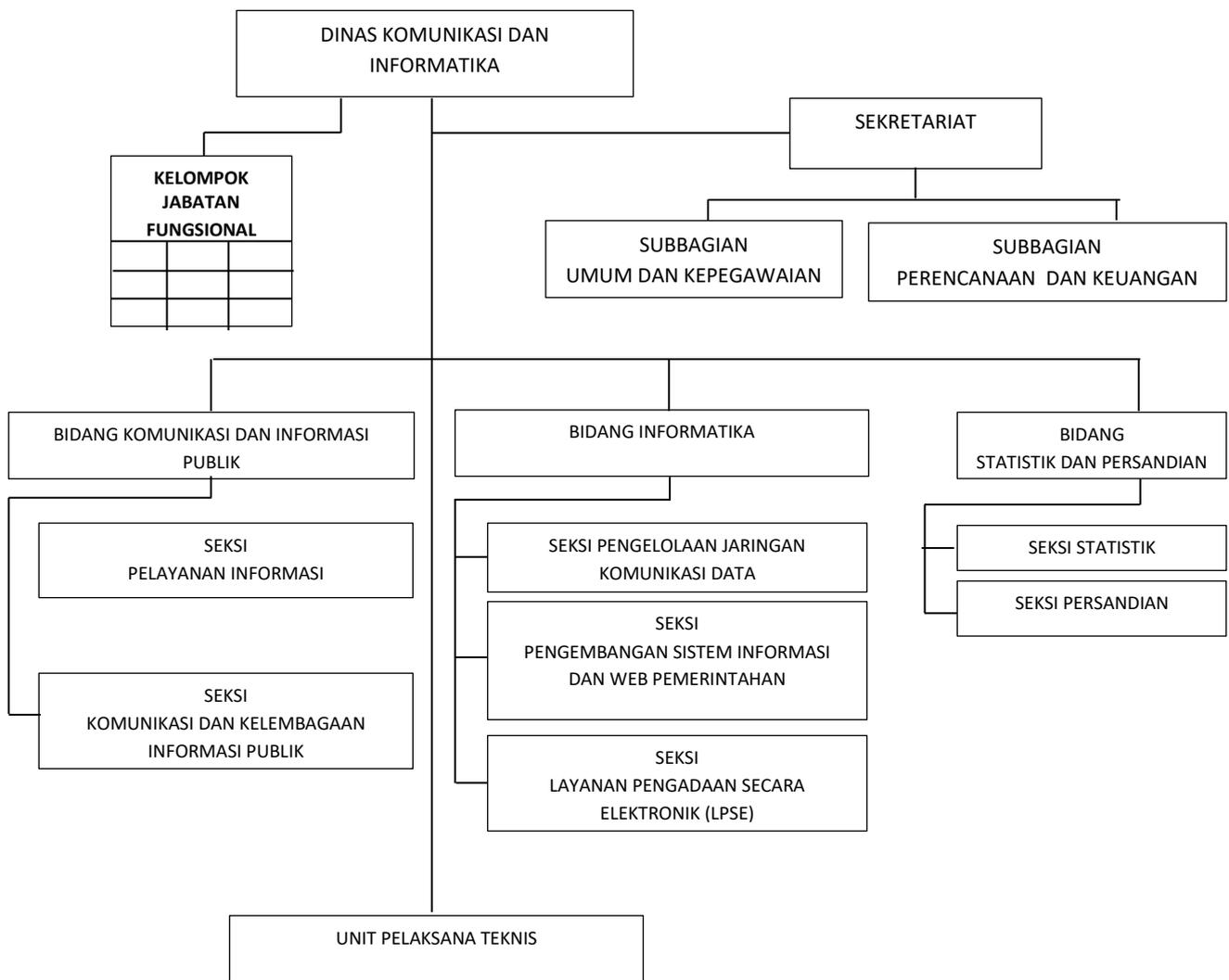
Perubahan Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

| Nomenklatur Lama | Nomenklatur Baru |
|--|---|
| Bidang Komunikasi | Bidang Komunikasi dan Informasi Publik |
| Seksi Pelayanan Informasi dan Mass Media, dan Pemberdayaan Kelembagaan Informasi | Seksi Pelayanan Informasi |
| Seksi Sarana Prasarana Komunikasi | Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik |

- **Struktur Organisasi**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
 Berdasarkan Perwali Nomor 64 Tahun 2016



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Berdasarkan Perwali Nomor 85 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru didukung oleh 35 orang PNS.

- **Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan di bidang komunikasi, informatika, serta bidang statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki SDM jumlah sebanyak 35 orang PNS, 2 PTT dan 9 tenaga kontrak terdiri dari:

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017

| | | |
|--|---|---|
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : | 35 orang |
| Pegawai Tidak Tetap (PTT) | : | 2 orang |
| Tenaga Kontrak | : | 9 orang |
| Dengan posisi / jabatan sebagai berikut: | | |
| Kepala Dinas (ess. IIb) | : | 1 orang |
| Sekretaris Dinas (ess. IIIa) | : | 1 orang |
| Kabid (ess. IIIb) | : | 3 orang |
| Kasi/Kasubbag (ess. IVa) | : | 9 orang |
| Pejabat Fungsional (Pranata komputer) | : | 5 orang |
| Staf PNS / PTT / Tenaga Kontrak | : | 27 orang |
| Keterangan tambahan | : | 1 orang Kabid pensiun per 1 Februari 2017 Kepala Dinas pensiun per 1 September 2017 1 orang Kasi dilantik per 16 Oktober 2017 |

| Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| SD | SMP | SMA | DI | DIII | DIV | S-1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
| | | 7 | | 5 | 1 | 17 | 4 | 1 | 35 |

| Jumlah PTT dan Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| SD | SMP | SMA | DI | DIII | DIV | S-1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
| | | 1 | | 2 | | 8 | | | 11 |

| Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-------------|---|---|---|-----|--------------|---|---|---|-----|-------------|---|---|---|-----|--------|
| Golongan I | | | | | Golongan II | | | | | Golongan III | | | | | Golongan IV | | | | | Jumlah |
| A | B | C | D | Jlh | A | B | C | D | Jlh | A | B | C | D | Jlh | A | B | C | D | Jlh | |
| | | | | | | 2 | 4 | 3 | | 6 | 9 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | 35 |

Selain SDM, sumber daya lain yang dapat memberi nilai tambah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, baik karena perubahan SKPD, mutasi SKPD, maupun karena belanja modal berupa :

Tabel 2.3.

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

| No | Nama Barang | Jlh Unit | Keterangan |
|----|---------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. | Sepeda Motor | 8 | 5 karena mutasi SKPD |
| 2. | Global Positioning System (GPS) | 3 | |
| 3 | AC Split | 15 | |
| 4 | Kipas Angin | 1 | |
| 5 | Camera Video | 1 | |
| 6 | Alat Pemadam Portable | | |
| 7 | Note Book | 1 | |
| 8 | Scanner | 1 | |
| 9 | Peralatan Jaringan Lain-lain | 10 | |
| 10 | Lensa Kamera | 1 | |
| 11 | Gordyn | 1 | |
| 12 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain | 1 | |

| | | | |
|----|---|----|--------------------------|
| 13 | UPS | 1 | |
| 14 | Router | 1 | |
| 15 | Radio Access Point | 1 | |
| 16 | Antene | 2 | |
| 17 | Switch Hub | 1 | |
| 18 | Peralatan studio Visual Lain-lain | 1 | |
| 19 | Kabel Listrik | 1 | |
| 20 | CCTV | 4 | |
| 21 | Sofa | 1 | |
| 22 | Televisi | 1 | |
| 23 | Camera Video | 1 | |
| 24 | Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain | 1 | |
| 25 | Server | 1 | |
| 26 | Audio Cassete Recorder | 1 | |
| 27 | Printer | 1 | |
| 28 | Peralatan Listrik | 1 | |
| 29 | Tool Kit Boks | 1 | |
| 30 | Meja Rapat | 6 | |
| 31 | Kursi Rapat | 14 | |
| 32 | Camera Film | 1 | |
| 33 | P.C Unit/ Komputer PC | 3 | |
| 34 | Lap Top | 2 | |
| 35 | Printer | 2 | |
| 36 | UPS | 21 | |
| 37 | Harddisk Internal | 3 | |
| 38 | Harddisk Eksternal | 1 | |
| 39 | Memory | 3 | |
| 40 | Server | 3 | |
| 41 | Router | 3 | |
| 42 | Peralatan Jaringan Lain-lain | 1 | |
| 43 | Switch Hub | 3 | |
| 44 | Wireless Access Point | 2 | |
| 45 | Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain | 1 | |
| 46 | Clearing Instalation | 1 | |
| 47 | Televisi | 4 | |
| 48 | P.C Unit/ Komputer PC | 7 | |
| 49 | Server | 1 | |
| 50 | Alat Pengaman (Sinyal) | 2 | |
| 51 | Meja Panjang | 1 | |
| 52 | Kursi Putar | 3 | |
| 53 | Loudspeaker | 1 | |
| 54 | Sound System | 1 | |
| 55 | P.C Unit/ Komputer PC | 8 | |
| 56 | Stabilizer/Stavolt | 1 | |
| 57 | Power Supply Microphone | 1 | |
| 58 | Facsimile | 1 | |
| 59 | Staion Wagon | 2 | Mutasi tambah antar SKPD |
| 60 | Toner Printer Laser | 1 | |
| 61 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 62 | Alat Penyimpanan Lain-lain | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 63 | Lemari Besi | 3 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 64 | Filling Besi/Metal | 4 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 65 | Lemari Kaca | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 66 | Mesin Absensi | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 67 | Meja Kayu/Rotan | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 68 | Meja Reseption | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |

| | | | |
|-----|---|----|--------------------------|
| 69 | Meja Tambahan | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 70 | Meja Bundar | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 71 | Kursi Kerja | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 72 | AC Unit | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 73 | Alat Pendingin Lain-lain | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 74 | Radio | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 75 | Televisi | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 76 | Sound System | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 77 | Wireless | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 78 | Microphone | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 79 | Camera Film | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 80 | Tangga Alumunium | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 81 | Tandon Air | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 82 | P.C Unit/ Komputer PC | 4 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 83 | Lap Top | 19 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 84 | Note Book | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 85 | Printer | 7 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 86 | UPS | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 87 | Memory | 4 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 88 | Power Supply | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 89 | Router | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 90 | Peralatan Jaringan Lain-lain | 6 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 91 | Switch Hub | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 92 | Wireless Access Point | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 93 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 94 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 4 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 95 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 9 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 96 | Meja Kerja | 27 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 97 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 98 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 99 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 9 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 100 | Layar Proyektor | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 101 | Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 102 | Film Projector | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 103 | Camera Film | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 104 | Lensa Kamera | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 105 | Lighting Head Body | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 106 | Alat Penyimpan Data | 2 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 107 | Pesawat Telephone | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 108 | Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain | 4 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 109 | Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 110 | Stabilizer | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 111 | Baterai | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 112 | Ember Plastik | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 113 | Garpu | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 114 | Papan Nama Instansi | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 115 | Papan Nama Ruangan/Jabatan | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 116 | Kursi Kerja | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 117 | Taplak Meja | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 118 | Jam Elektronik | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 119 | Kompore Gas | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 120 | Dispenser | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 121 | Radio | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 122 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 123 | Selang Penyemprot Air | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 124 | Peralatan Jaringan Lain-lain | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |

| | | | |
|-----|------------------------|---|--------------------------|
| 125 | Lighting Stand Tripod | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 126 | Mangkok Porselin | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 127 | Kabel Listril | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 128 | Gelas minum | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 129 | Pisau | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 130 | Gelas Penutup | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |
| 131 | Buku Laporan Lain-lain | 1 | Belanja Modal tahun 2017 |

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan nomenklatur baru yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu pada RJPMD Kota Banjarbaru 2016-2021 juga pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008). Selain itu, kinerja Dinas Kominfo juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pencapaian kinerja Diskominfo Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Diskominfo Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------|------------|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 1 (6) | 2 (7) | 3 (8) | 4 (9) | 5 (10) | 1 (11) | 2 (12) | 3 (13) | 4 (14) | 5 (15) | 1 (16) | 2 (17) | 3 (18) | 4 (19) | 5 (20) |
| | I. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian Informasi nasional/daerah melalui; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Media baru seperti website(online) | | | | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Melalui media tradisional seperti: Pertunjukkan rakyat | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | c. Media Interpersonal seperti : saresehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | d. Media luar ruang seperti; buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | II. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan | | | Persentase KIM yang terbentuk dan terbina di tingkat kelurahan | 15% | 40% | 65% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Diskominfo Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase informasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah | | | Prosentase badan publik lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang menyampaikan informasi publik sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 | 32.6% | 42.3% | 73% | 80.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase penduduk yang terpapar informasi publik Pemerintah Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase penyelenggaraan layanan publik, kegiatan, kelembagaan di lingkungan Pemda Kab/Kota menggunakan domain resmi instansi penyelenggara | | | Persentase website unit kerja yang aktif dan menggunakan domain banjarbaru.kota.go.id | 33% | 42% | 53% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Diskominfo Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Pengelolaan e-government di lingkup Pemda Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks PeGI Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | IKK (Permendagri 86 Tahun 2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Buku "Kabupaten Dalam Angka" | | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Buku "PDRB" | | | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persandian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | | | | n/a | 6% | 15% | 25% | 30% | n/a | 6% | 15% | 25% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | IKU Diskominfo Bjb | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | | | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Prosentase SKPD yang terkoneksi dengan Kominfo | | | | 16% | 23% | 53% | 76% | 100% | 16% | 23% | 53% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Prosentase tindak lanjut laporan atas atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Nilai Hasil Evaluasi AKIP | | | | CC | B | B | A | A | CC | B | B | A | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Indeks kepuasan pelayanan internal | | | | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru

| Ususan Komunikasi dan Informasi | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata | |
|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|---------------|-----------|
| | Ke- | | | | | | | | | | | | | | | Perubahan | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Belanja Pegawai | 3,052,021,000 | 3,205,000,000 | 3,365,000,000 | 3,533,000,000 | 3,710,000,000 | 2,630,691,431 | 3,205,000,000 | 3,365,000,000 | 3,533,000,000 | 3,710,000,000 | 86.20% | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,373,004,200 | 80.17 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 983,901,880 | 10,697,845,995 | 1,155,000,000 | 1,180,500,000 | 1,240,000,000 | 801,375,960 | 10,697,845,995 | 1,155,000,000 | 1,180,500,000 | 1,240,000,000 | 81.45% | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,051,449,575 | 80.16 |
| Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur | 1,105,402,525 | 229,731,550 | 273,000,000 | 305,000,000 | 337,000,000 | 1,005,538,735 | 229,731,550 | 273,000,000 | 305,000,000 | 337,000,000 | 90.97% | 100 | 100 | 100 | 100 | 450,026,815 | 80.18 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 123,359,955 | | | | | 99,230,000 | | | | | 80.44% | | | | | 123,359,955 | 80.44 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 28,639,900 | 31,998,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 27,392,600 | 31,998,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 95.64% | 100 | 100 | 100 | 100 | 43,127,580 | 80.19 |

| Utusan Komunikasi dan Informasi | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|---------------|-----------|
| | Ke- | | | | | | | | | | | | | | | Pertumbuhan | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 5,110,436,500 | | | | | 4,342,617,123 | | | | | 84.98% | | | | | 5,110,436,500 | 84.98 |
| Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi | 300,000,000 | | | | | 266,009,000 | | | | | 88.68% | | | | | 300,000,000 | 88.68 |
| Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 20,000,000 | | | | | 10,940,000 | | | | | 54.70% | | | | | 20,000,000 | 0.55 |
| Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | 1,571,614,900 | | | | | 1,556,502,281 | | | | | 99.04% | | | | | 1,571,614,900 | 99.04 |
| Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik | 32,125,000 | 40,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 | 32,125,000 | 40,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 | 100.00% | 100 | 100 | 100 | 100 | 290,425,000 | 80.20 |
| Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK | nia | 5,013,958,880 | 9,850,000,000 | 7,540,000,000 | 3,237,000,000 | nia | 5,013,958,880 | 9,850,000,000 | 7,540,000,000 | 3,237,000,000 | nia | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,410,239,720 | 100.00 |

| Utusan Komunikasi dan Informasi | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata | |
|--|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|---------------|-----------|
| | Ke- | | | | | | | | | | | | | | | Pertumbuhan | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | 14.997.500 | 140.112.300 | 405.000.000 | 510.000.000 | 569.000.000 | 14.159.000 | 140.112.300 | 405.000.000 | 510.000.000 | 569.000.000 | 94,41% | 100 | 100 | 100 | 100 | 327.821.960 | 80,19 |
| Program Layanan Penjaminan Keadulatan Informasi Pemerintah Daerah | n/a | 531.113.700 | 615.000.000 | 710.000.000 | 782.000.000 | n/a | 531.113.700 | 615.000.000 | 710.000.000 | 782.000.000 | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 659.528.425 | 100,00 |
| Program Pengembangan Pemandangan Nasional | n/a | 119.418.000 | 183.000.000 | 239.000.000 | 239.000.000 | n/a | 119.418.000 | 183.000.000 | 239.000.000 | 239.000.000 | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 195.104.500 | 100,00 |
| Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 221.438.500 | 156.599.225 | 172.000.000 | 190.000.000 | 208.000.000 | 217.471.500 | 156.599.225 | 172.000.000 | 190.000.000 | 208.000.000 | 96,21% | 100 | 100 | 100 | 100 | 189.607.545 | 80,20 |
| Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan TK | n/a | 47.500.000 | 9.850.000.000 | 7.540.000.000 | 3.237.000.000 | n/a | 47.500.000 | 9.850.000.000 | 7.540.000.000 | 3.237.000.000 | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.168.625.000 | 100,00 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju kota Banjarbaru sebagai kota jasa yang diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Diskominfo dan seluruh untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Kemitraan yang kuat dari seluruh aparatur Diskominfo untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
2. Kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga-lembaga koalisi masyarakat yang ada di kota Banjarbaru dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat. Adanya penyebaran Informasi guna mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Adanya dukungan sarana Informasi (surat kabar, radio dan TV) sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
4. Tersedianya kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat
5. Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

1. Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi, banyaknya bermunculan tower atau menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru yang harus ditata dan diatur keberadaannya.
2. Informasi program kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru
3. Koneksitas internet di SKPD masih belum optimal
4. Mengintegrasikan aplikasi yang telah ada di SKPD dalam mendukung SPBE
5. *Me-manage* aplikasi yang akan dibuat SKPD agar sesuai dengan Masterplan TIK Kota Banjarbaru yang telah dibuat.
6. Pengelolaan website Pemerintahan secara terintegrasi
7. Jaminan keamanan penggunaan TIK pada Pemerintah Kota Banjarbaru
8. Meminimalisir kesenjangan kemampuan TIK aparatur dan masyarakat di Kota Banjarbaru

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- Memberikan peluang bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal pembangunan daerah
- Memaksimalkan pelayanan informasi melalui media yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (internet, media center, pelayanan pengaduan publik, dll)
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Kelompok Informasi Masyarakat
- Meningkatkan bandwidth yang ada sehingga dapat diakses secara maksimal

Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi Kalsel

Secara substansi, hubungan RENSTRA Diskominfo Kota Banjarbaru dengan RENSTRA Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan dan Renstra KEMKOMINFO ada pada tujuan pemanfaatan teknologi Informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
 Keterkaitan Sasaran Strategis pada Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalsel dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

| Kementerian Kominfo Tahun 2015-2018 | Diskominfo Provinsi Kalsel Tahun 2017-2021 | Diskominfo Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 |
|---|---|--|
| Sasaran Strategis : | Sasaran Strategis : | Sasaran Strategis : |
| Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia | Meningkatnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Prov. Kalsel | terwujudnya kualitas layanan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi |
| Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514) | Persentase pemenuhan standar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Prov. Kalsel | Prosentase unit kerja yang terhubung dengan kominfo melalui jaringan FO dan radio |
| Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514) | Persentase SPD yang mengintegrasikan data | Prosentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung SPBE |
| Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia | Persentase peningkatan SPD terhadap keamanan informasi | Prosentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah |
| Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband | | Tingkat kepatuhan penyelenggaraan lelang elektronik melalui LPSE sesuai standarisasi LPSE:2014 |
| Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio | | Prosentase website unit kerja yang aktif dan menggunakan domain banjarbarukota.go.id |
| Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika | Meningkatnya kualitas eGovernment di Prov. Kalsel | |
| Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan | Ranking pemeringkatan eGovernment Indonesia (PEGI) | |

| | | |
|---|--|--|
| para pemangku kepentingan | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi | | |
| Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi | | |
| Terwujudnya pengentasan kesenjangan digital dan mempertahankan kedaulatan di wilayah 3T dan Lokpri | | |
| Jumlah Kebijakan terkait infrastruktur Penyiaran dan Pita Lebar | | |
| Persentase (%) desa di wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri yang memperoleh akses telekomunikasi bergerak seluler (BTS) | | |
| Jumlah akses internet di lokasi layanan publik (antara lain puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Pariwisata, Sentra Produktif) diprioritaskan pada wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri. | | |
| Persentase (%) Infrastruktur Pemancar Lembaga Penyiaran Publik di daerah 3T yang berfungsi dengan baik | | |
| Persentase (%) penyelesaian Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring) | | |
| Terwujudnya peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah 3T dan Perbatasan dengan Penguatan Ekosistem | | |
| Persentase (%) desa 3T yang bebas buta internet | | |
| Terwujudnya Migrasi TV dari Analog ke Digital | | |
| Jumlah Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran inisiatif DPR | | |
| Persentase (%) keberhasilan uji coba siaran TV digital | | |
| Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi yang mendukung keamanan dan ketertiban | | |
| Jumlah Naskah kebijakan di bidang registrasi Kartu Prabayar | | |
| Terwujudnya Ketaatan Penyelenggara Telekomunikasi dalam pemenuhan Penggunaan Produksi dalam Negeri | | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada frekuensi 2,1 Ghz yang dilakukan verifikasi terhadap TKDN sesuai amanat regulasi | | |
| Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan TIK dan aplikasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan sektor sektor strategis pemerintah | | |
| Perbaikan Peringkat Indeks ICT Indonesia | | |
| Jumlah technopreneur mandiri yang tercipta | | |
| Jumlah nama domain .id untuk UKM, sekolah, komunitas, dan desa yang diberikan gratis dan dimanfaatkan | | |
| Jumlah Sertifikat Digital | | |
| Jumlah UMKM Go Online | | |
| Jumlah Petani dan Nelayan Go Online | | |
| Jumlah Dokumen Peta ekosistem ekonomi digital | | |
| Jumlah inisiatif roadmap e-Government tahap II yang terlaksana | | |
| Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia | Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Prov. Kalsel. | Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan public |
| Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah | Persentase cakupan desiminasi informasi publik ke masyarakat Prov. Kalsel | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan penyampaian informasi public |
| Persentase (%)Konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik | Persentase data sektoral Prov. Kalsel yang akurat | Meningkatnya penyajian informasi publik khususnya data statistik sektoral |
| Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat | | Meningkatnya jumlah informasi publik yang disampaikan SKPD sesuai UU No.14 Tahun 2008 |
| Persentase (%) Pengelolaan Kanal Informasi Pusat, Daerah dan Mitra; | | Prosentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan |
| | Meningkatnya layanan jaringan komunikasi publik di Prov. Kalsel | |
| | Persentase daerah yang tercover jaringan komunikasi publik | |
| | Persentase peningkatan layanan jaringan komunikasi publik | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo | Meningkatnya kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel | Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Persentase (%) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo | Nilai Sakip Dinas Kominfo Prov. Kalsel | Indeks kepuasan pelayanan internal |
| Opini atas Laporan Keuangan | | Nilai Evaluasi AKIP |
| Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan | | |
| Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder | | |
| Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | | |
| Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK | | |
| Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK berbasis SKKNI | | |
| Jumlah rancangan regulasi SKKNI Bidang Kominfo | | |
| Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah | | |
| Jumlah peserta literasi TIK untuk anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas | | |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kondisi atau gambaran umum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

- a. Belum semua unit kerja memiliki jalur koneksitas
- b. Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
- c. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat
- d. Masih kurangnya sarana Komunikasi dan Informatika
- e. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi
- f. Terbatasnya tenaga teknis bidang IT
- g. Masih kurang diberdayakannya Kelompok Informasi Masyarakat
- h. Belum tersedianya *data center* yang melayani penyimpanan data digital bagi SKPD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan *common data base system* informasi bagi semua entitas
- i. Masih banyak unit kerja yang belum memanfaatkan secara maksimal ketersediaan sub domain banjarbarukota.go.id
- j. Bandwidth internet terpusat yang dikelola oleh Diskominfo besarnya belum memadai
- k. belum ada jalur *backup* jaringan internet di Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru
- l. Infrastruktur Jaringan belum menerapkan mekanisme *Firewall* dan *Proxy server* untuk memberikan keamanan akses internet
- m. Keamanan infrastruktur baru ditetapkan secara terbatas
- n. Banyak infrastruktur yang informasi penting dan kemampuan pengelolaannya masih diserahkan ke pihak ketiga tanpa ada tenaga ahli yang memadai dari pihak internal Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga jika terjadi masalah dengan pihak ketiga, menimbulkan potensi terganggunya layanan infrastruktur.
- o. penggunaan infrastruktur juga masih ada yang belum optimal, misalnya beberapa server hanya diisi dengan aplikasi website saja, belum dimanfaatkan untuk server penyimpanan aplikasi transaksi operasional pemerintahan.

- p. PPID yang telah terbentuk belum dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung terwujudnya Keterbukaan Informasi sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008

3.2 Telahaan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter”.

Untuk menunjang visi diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan pada misi ke 4 yaitu : **“Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi”**

Pada misi ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menunjang Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya pemerintahan Kota Banjarbaru yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN.

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan informasi publik.

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Banjarbaru serta RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu :

- Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikutserta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru
- Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
- Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

Tabel 3.1 Analisis SWOT

| | | |
|---|--|---|
| ALI | Kekuatan/Strenght | Kelemahan/Weakness |
| | <p>Sumber daya aparatur yang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 memadai 2. Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif 4. Pemerintah daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP belum tersedia 2. Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik 3. Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah 4. Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai 5. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal. |
| ALE | | |
| Peluang/Oportunity | Strategi (S - O) | Strategi (W - O) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Bandara dan Kemudahan akses menuju Pelabuhan Trisakti 2. Peningkatan laju pertumbuhan perekonomian 3. Pengembangan kota jasa yang profesional 4. Pusat pendidikan, perekonomian dan Perdagangan yang luas 5. Adanya pelimpahan urusan /kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas 2. Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung peggembangan Kota Bandung sebagai kota jasa. 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota jasa yang profesional. 4. pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif 2. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. |
| Ancaman/Threat | Strategi (S - T) | Strategi (W - T) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok. 2. Krisis keuangan global. 3. Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 4. Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM. 5. Penurunan luas lahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecen-derungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM 2. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki manajemen layanan publik berbasis <i>reinventing government</i> 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Program-program rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah termuat dan bersesuaian dengan program-program pada RPJMD Kota

Banjarbaru Tahun 2016-2021. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada semua urusan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2016-2021 disusun pada saat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru belum terbentuk (masih menjadi Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika). Rekomendasi KLHS Tahun 2016-2021 lebih menekankan pada program-program terkait bidang Perhubungan seperti tampak pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
 Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Isu KLHS

| No | Indikasi Program | Deskripsi Pengaruh | Mitigasi |
|----|--|--|---|
| 1 | Program peningkatan Pelayanan Angkutan | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dapat menimbulkan pencemaran udara akibat banyaknya penggunaan kendaraan bermotor | Program peningkatan Pelayanan Angkutan perlu adanya ruang hijau jalan/turus jalan, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan pembatasan umur kendaraan yang tidak layak pakai serta penegakan hukum tentang pengujian emisi kendaraan secara berkala dan pelarangan pembuangan sampah di sembarang tempat. |
| 2 | Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ | Memiliki pengaruh terkait dengan ketersediaan listrik | Untuk kepentingan umum diupayakan oleh Pemerintah dengan bekerjasama/berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, sedangkan untuk Badan Usaha yang sifatnya bisnis dapat mengupayakan ketersediaan listrik sendiri. Selain itu perlu diupayakan juga energi listrik alternatif |
| 3 | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Memiliki pengaruh terkait dengan ketersediaan listrik | Untuk kepentingan umum diupayakan oleh Pemerintah dengan bekerjasama/berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, sedangkan untuk Badan Usaha yang sifatnya bisnis dapat mengupayakan ketersediaan listrik sendiri. Selain itu perlu diupayakan juga energi listrik alternatif |
| 4 | Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Program tersebut dapat memicu terjadinya | Diperlukan pengawasan, patroli, sosialisasi penataan peraturan terkait |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| | | peredaran dan penyalahgunaan NAPZA | penyalahgunaan narkoba, membuat peraturan sesuai dengan norma setempat, menyelenggarakan layanan pengaduan, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama secara terpadu dengan pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan Narkoba. Selain itu, juga diperlukan peningkatan pendidikan moral dan pendidikan agama. |
|--|--|------------------------------------|--|

Namun, dalam proses pelaksanaan dan perumusan substansi KLHS terutama dari hasil pengawasan mutu, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu terkait ketersediaan data oleh Pemerintah.

Rekomendasi perbaikan yang dimaksud yaitu pengadaan data oleh Pemerintah perlu terfokus pada kebutuhan data menyeluruh bagi perumusan kebijakan dan perencanaan, termasuk pengadaan data yang berkelanjutan. Keselarasan waktu serial data dan kesediaan lembaga-lembaga terkait untuk berbagi data sangat berpengaruh pada saat melakukan pengkajian konsistensi keterkaitan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, perlu ada data rinci terkait program-program pilihan yang dinilai relevan dengan isu-isu strategis dan memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan data yang berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK yaitu dengan menyediakan konektivitas antar unit kerja, didukung dengan Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem informasi baik untuk monitoring maupun perumusan kebijakan serta Program Pengembangan Data/Informasi dengan tersedianya informasi publik khususnya data lintas sektoral.

Untuk pembatasan akses terhadap data dan informasi penting dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) dapat dilaksanakan melalui Program Pengembangan Persandian Nasional.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat, keberadaannya mulai menjadi bagian dari keseharian masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran pemerintahan, namun di sisi lain kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat sehingga, masih memunculkan kesenjangan yang semakin hari semakin bertambah.

e-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selama lima tahun terakhir, implementasi *e-government* mulai berkembang di Kota Banjarbaru. Namun secara substansif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi *e-government* semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi, dan sumberdaya manusia.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Beberapa negara, termasuk Indonesia meyakini bahwa konsep kota pintar (Smart City) dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi. Untuk itulah guna memperkuat peran ICT sebagai *enabler* di semua pilar *smart city* dalam menciptakan ekosistem *smart city*, khususnya pada sektor strategis yang dimiliki oleh masing-masing daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden serta Kompas Gramedia menyelenggarakan Gerakan Menuju 100 *Smart City*.

Targetnya, hingga tahun 2019 akan ada 100 daerah (25 kabupaten/kota (2017), 50 kabupaten/kota (2018), 25 kabupaten/kota (2019)) yang menjadi *role model* dalam implementasi program *smart city*. Pemilihan kabupaten/kota dilaksanakan dengan

mempertimbangkan beberapa indikator, seperti Kemampuan Keuangan Daerah, Indeks Kota Hijau oleh Kementerian PUPR, Indeks Kinerja Pemerintah Daerah dari Kemendagri, dan Indeks Kota Berkelanjutan (khusus kota) dari Bappenas, visi pemimpin daerah, hingga kesiapan SDM di masing-masing daerah

Hal ini sebagai implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, dimana salah satu fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di bidang komunikasi dan informatika adalah menyelenggarakan sistem informasi *smart city*. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan sebagai *leading sector* dalam implementasi *smart city*.

Selain itu, Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Terwujudnya Banjarbaru Smart City melalui strategi pelayanan berbasis **Information Communication Technology (ICT)** yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan
2. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
3. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota
7. Penguatan jalur koneksitas antar unit kerja
8. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Kota;
9. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
10. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa medatang. Karenanya tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Banjarbaru

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|--|---|---|--|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru efektif, efesien, akuntabel dan bebas kkn | Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui TIK | Presentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | n/a | 6 | 15 | 25 | 30 |
| | | | Persentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| | | | Prosentase SKPD yang terkoneksi dengan Kominfo | 16 | 23 | 53 | 76 | 100 |
| | | Mewujudkan peningkatan akses dn kualitas layanan publik | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kelurahan | 15 | 40 | 65 | 90 | 100 |
| | | | Buku "Statistik Kota Banjarbaru" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | Buku "PDRB" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | Prosentase tindaklanjut laporan atas atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|------|
| | | Prosentase badan publik lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang menyampaikan informasi publik sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 | 32.6 | 42.3 | 73 | 80.7 | 100 |
| | Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan | Nilai Hasil Evaluasi AKIP | CC | B | B | A | A |
| | | Indeks kepuasan pelayanan internal | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada pada penyusunan kegiatan, karenanya harus dapat menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Untuk mencapai misi keempat Pemerintah Kota Banjarbaru, maka strategi dan arah kebijakan yang dibuat dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI : Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter | | | |
|--|--|---|--|
| MISI 4 : Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru efektif, efisien, akuntabel dan bebas kkn | 1.1. Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Informasi Publik | Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi public | Membuka layanan partisipasi, aspirasi, pengelolaan opini dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan |
| | | Menguatkan fungsi PPID dan PPIDP sebagai upaya mendukung Keterbukaan Informasi Publik | <ul style="list-style-type: none"> Menambah wawasan SKPD tentang UU No.14 Tahun 2008 Mengembangkan layanan publik yang interaktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan public yang transparan dan lebih baik |
| | | Memaksimalkan sumber daya komunikasi publik di daerah | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah KIM yang terbentuk dan terbina Meningkatkan |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>kemampuan untuk memberdayakan potensi (IT) masyarakat guna memenuhi kebutuhan pendayagunaan media informasi dan komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif |
| | Memperkuat fungsi statistik di daerah | Menyajikan informasi publik khususnya data statistik sektoral |
| 1.2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Pembuatan Master Plan TIK sebagai pedoman pengembangan TIK di Banjarbaru | <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dan menyediakan payung hukum yang memperkuat setiap kebijakan IT di daerah termasuk pemenuhan tuntutan transparansi layanan publik, peningkatan kualitas SDM bidang IT di SKPD dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat • Mengefektifkan komunikasi dan pengawasan terhadap SKPD yang membangun aplikasi agar sesuai dengan Roadmap Pengembangan Aplikasi |
| | Meningkatkan dukungan dan kesadaran SKPD terhadap pengembangan IT melalui penyediaan infrastruktur IT | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur TIK, Media center, aplikasi pemerintahan dan domain resmi • Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan ke depan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan lebih baik • Meningkatkan SDM Bidang IT sesuai tupoksi SKPD • Meningkatkan |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>kualitas proses dan output yang dihasilkan oleh integrasi sarana informasi dan database SKPD untuk meningkatkan kinerja SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan website resmi SKPD |
| | 2. Memperkuat peran persandian dalam mengamankan informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan standar pengamanan informasi sesuai ISO 27001 |
| 1.3. Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan | Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu • Meningkatkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

1. SASARAN 1 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI TIK

Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
- Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana persandian
- Perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
- Penyelenggaraan sistem layanan pengadaan secara elektronik
- Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana TI

Program Pengembangan Persandian Nasional

- Pembinaan penyelenggaraan persandian
- Pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi berklasifikasi
- Perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah

- Perumusan regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, sub domain serta website dan konten
- Penyelenggaraan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah
- Penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota

Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

- Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik

Program kerjasama informasi dengan mass media

- Pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana TI

Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

- Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK
- Penyelenggaraan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah
- Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi

2. SASARAN 2 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK**Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik**

- Pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat

Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

- Fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi publik
- Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi publik
- Pelayanan permintaan informasi publik

Program pengembangan data/informasi

- Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
- Penyusunan dan analisis data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
- Penyusunan profil daerah

Program Kerjasama informasi dengan mass media

- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. SASARAN 3 : MENINGKATNYA IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa non PNS

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan non formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan
- Perencanaan dan pelaporan manajemen aset barang

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2016) | Tahun-1 (2017) | | Tahun-2 (2018) | | Tahun-3 (2019) | | Tahun-4 (2020) | | Tahun-5 (2021) | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|--|------|----|----|----|---|---|---|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|---|--------|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | 19 | 20 |
| Terwujudnya pemerintahan kota Banjarbaru efektif, efisien, akuntabel dan bebas kkn | Meningkatnya implementasi pengembangan Sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan | 10 | 01 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indikator Kinerja : Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran Output : Tersedianya Pembayaran Listrik, Air, Telepon, dan Internet, jasa kebersihan, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, barang cetakan dan pengadaan, makan minum rapat dan tamu | | 12 bln | 3,000,000 | | | | | | | | | | | subbag umpeg | |
| | | 10 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Output :Tersedianya pembayaran listrik, air, telepon dan internet | | 12 bln | 103,104,000 | 12 bln | 93,912,000 | 12 bln | 150,000,000 | 12 bln | 150,000,000 | 12 bln | 175,000,000 | 12 bln | 175,000,000 | subbag umpeg | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|--|---|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|--|
| | | 10 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor | Output : Tersedianya jasa kebersihan Kantor | | 12 bln | 7,200,000 | 12 bln | 14,400,000 | 12 bln | 17,000,000 | 12 bln | 19,000,000 | 12 bln | 21,000,000 | 12 bln | 21,000,000 | subbag umpeg | |
| | | 10 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Output : Tersedianya alat tulis kantor | | 12 bln | 115,000,000 | 12 bln | 30,736,800 | 12 bln | 35,000,000 | 12 bln | 40,000,000 | 12 bln | 45,000,000 | 12 bln | 45,000,000 | subbag umpeg | |
| | | 10 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | 12 bln | 21,999,900 | 12 bln | 19,332,400 | 12 bln | 20,000,000 | 12 bln | 22,000,000 | 12 bln | 23,000,000 | 12 bln | 23,000,000 | subbag umpeg | |
| | | 10 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | | 12 bln | 6,937,700 | 12 bln | 7,840,450 | 12 bln | 10,000,000 | 12 bln | 12,000,000 | 12 bln | 13,000,000 | 12 bln | 13,000,000 | subbag umpeg | |
| | | 10 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Output : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu | | 12 bln | 55,230,000 | 12 bln | 102,675,000 | 12 bln | 106,000,000 | 12 bln | 110,000,000 | 12 bln | 115,000,000 | 12 bln | 115,000,000 | subbag umpeg | |
| | | 10 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | | 12 bln | 6,105,000 | 12 bln | 6,361,200 | 12 bln | 7,000,000 | 12 bln | 7,500,000 | 12 bln | 8,000,000 | 12 bln | 8,000,000 | subbag umpeg | |
| | | 10 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Output : terlaksananya perjalanan dinas luar daerah/luar provinsi, luar daerah/dalam provinsi | | 12 bln | 399,205,280 | 12 bln | 489,846,745 | 12 bln | 500,000,000 | 12 bln | 510,000,000 | 12 bln | 525,000,000 | 12 bln | 525,000,000 | subbag umpeg | |
| | | 10 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Non PNS | Output : Tersedianya honorium jasa non PNS | | 12 bln | 366,120,000 | 12 bln | 304,680,000 | 12 bln | 310,000,000 | 12 bln | 310,000,000 | 12 bln | 315,000,000 | 12 bln | 315,000,000 | subbag umpeg | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|--|--|--------------|-------|------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Indikator kinerja : Nilai Evaluasi AKIP Outcome : cakupan laporan kinerja dan keuangan serta presentase tertib administrasi barang/aset daerah Output : Tersedianya dokumen perencanaan, laporan keuangan dan inventaris barang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 01 | 06 | 05 | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan | Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan | | 1 th | 22,579,900 | 1 th | 24,309,400 | 1 th | 30,000,000 | 1 th | 35,000,000 | 1 th | 40,000,000 | 1 th | 40,000,000 | subbag perenc. & keu |
| | | 10 | 01 | 06 | 09 | Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset Barang | Tersedianya laporan inventaris barang/aset | | 1 th | 6,060,000 | 1 th | 7,688,600 | 1 th | 8,000,000 | 1 th | 10,000,000 | 1 th | 15,000,000 | 1 th | 15,000,000 | subbag perenc. & keu |
| | Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui TIK | | | | | Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK | Indikator Kinerja : Persentase unit kerja yang terhubung dg Kominfo melalui jaringan FO dan radio Outcome : terwujudnya layanan komunikasi dan informasi melalui pemanfaatan TIK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 01 | 20 | 02 | Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah | Output : terpenuhinya kebutuhan SKPD terhadap jaringan internet dan intranet | 6 unit kerja | 23 uk | | 45 uk | 343,400,000 | 74 uk | 900,000,000 | 109 uk | 900,000,000 | 144 uk | 925,000,000 | 144 uk | 925,000,000 | Seksi Jarkomdat |
| | | 10 | 01 | 20 | 03 | Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK | Output : Meningkatnya kualitas infrastruktur Data TIK | | | | | 4,551,038,880 | 51 | 8,750,000,000 | 76 | 6,400,000,000 | 100 | 2,050,000,000 | 100 | 2,050,000,000 | Seksi Jarkomdat |
| | | 10 | 01 | 20 | 04 | Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang | Output : terbentuknya Tim e-government, kerjasama dengan cibilas akademika, digital scanner, perangkat aplikasi | | | | | 119,520,000 | | 200,000,000 | | 240,000,000 | | 262,000,000 | | 262,000,000 | Seksi Pengembangan Si dan Web Pem |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|--|--|-----|-----|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 10 | 01 | 23 | 02 | Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik | Output : terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan komunikasi publik | | | 25 | 29,804,900 | 50 | 50,000,000 | 75 | 69,000,000 | 100 | 90,000,000 | 100 | 90,000,000 | Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik |
| | 10 | 01 | 23 | 03 | Pelayanan Permintaan Informasi Publik | Output : terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi publik | | | 42.3 | 40,044,900 | 73 | 210,000,000 | 80.7 | 231,000,000 | 100 | 254,000,000 | 100 | 254,000,000 | Seksi Pelayanan Informasi |
| | | | | | Program Pengembangan Data/Informasi | Indikator kinerja : Tersedianya Buku Statistik Banjarbaru dan PDRB Outcome: Meningkatnya ketersediaan data/informasi Output : Buku Indikator Makro, booklet, leaflet, | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 01 | 24 | 01 | Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan | tersusunnya buku statistik Kota Banjarbaru dan penyusunan buku 8 kelompok data penting pembangunan | n/a | 37% | 77,956,000 | 75,889,800 | 83,478,780 | 91,826,600 | 101,009,200 | 101,009,200 | 101,009,200 | 101,009,200 | 101,009,200 | 101,009,200 | Seksi Statistik |
| | 10 | 01 | 24 | 02 | Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Buku Indikator Makro | n/a | 37% | 62,282,500 | 60,835,625 | 66,919,000 | 73,610,900 | 80,971,900 | 80,971,900 | 80,971,900 | 80,971,900 | 80,971,900 | 80,971,900 | Seksi Statistik |
| | 10 | 01 | 24 | 03 | Penyusunan Profile Daerah | booklet dan leaflet | n/a | 37% | 81,200,000 | 19,873,800 | 21,861,100 | 24,047,200 | 26,451,900 | 26,451,900 | 26,451,900 | 26,451,900 | 26,451,900 | 26,451,900 | Seksi Statistik |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, ada beberapa indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan. Indikator ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021. Tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berdasarkan rencana Program dan Kegiatan selama 5 tahun kedepan. Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

| Aspek / Fokus / Bidang / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir |
|--|------------------|--------------|---|------|------|------|------|------|---------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kelurahan | % | n/a | n/a | 15 | 40 | 65 | 90 | 100 | 100 |
| Buku "Statistik Kota Banjarbaru" | Ada/Tidak | n/a | n/a | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Buku "PDRB" | Ada/Tidak | n/a | n/a | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Presentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | n/a | n/a | n/a | 6 | 15 | 25 | 30 | 30 |
| Persentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Presentase unit kerja yang terkoneksi dengan Kominfo | % | 4 | 4 | 16 | 23 | 53 | 76 | 100 | 100 |
| Presentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan | % | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Presentase informasi publik yang disampaikan unit kerja lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 | % | n/a | n/a | 32.6 | 42.3 | 73 | 80.7 | 100 | 100 |
| Nilai Hasil Evaluasi AKIP | AA/A/B/CC/C/D | n/a | n/a | BB | B | B | A | A | A |
| Indeks kepuasan pelayanan internal | Baik/Cukup/Buruk | n/a | n/a | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Renstra SKPD juga menjadi pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam pelaksanaan tugas menjadi hal yang harus dilaksanakan. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Banjarbaru merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* menuju terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter.